sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualifikasi audit dalam penerbitan laporan audit merupakan sinyal serius bagi suatu perusahaan. Sinyal serius tersebut adalah adanya respon negatif pasar modal melalui penurunan nilai saham pada perusahaan yang memperoleh kualifikasi audit pada pos-pos yang dianggap penting. Dengan adanya kualifikasi dalam laporan audit menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pembiayaan di pasar modal karena investor lebih memilih menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan dan kinerja yang bagus dimana kondisi tersebut salah satunya tercermin dalam laporan keuangan auditan. Selain itu dengan adanya kualifikasi audit seperti kualifikasi going concern dapat membuat lembaga perbankan membatalkan pemberian pinjaman kredit kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari pinjaman kredit.

Pada umumnya perusahaan publik memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana atau alternatif pembiayaan. Investor akan menanamkan modal pada perusahaan apabila investasinya dapat menghasilkan sejumlah keuntungan. Keberadaan pasar modal menjadikan perusahaan mempunyai alat untuk refleksi diri tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan dan kinerja perusahaan bagus maka pasar akan merespon dengan positif melalui peningkatan harga saham perusahaan.

ak Kasim Ria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Operasi tangkap tangan (OTT) suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kemendes dinilai menjadi titik mengkhawatirkan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada Ada motif transaksional untuk mendapatkan level audit yang diberikan oleh BPK yang sebelumnya wajar dengan pengecualian (WDP) sampai akan mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) motif transaksional dalam pemberian WTP. Kemendes meraih opini WTP pada laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebelumnya, pada 2014 dan 2015 Kemendes mendapatkan opini WDP dari BPK. Sementara itu, Firdaus Ilyas dari Divisi Riset ICW mengatakan pihaknya sudah mendata kasus penyimpangan terkait auditor BPK. ICW mencatat ada delapan kasus yang melibatkan oknum pejabat BPK sejak tahun 2004.

Mungkin sejak 2004 sudah ada delapan kasus yang melibatkan auditor atau pejabat BPK. Terkait itu dalam jual-beli opini atau terkait dalam proses pemeriksaan,beberapa audit yang diduga bermasalah di antaranya, Audit laporan keuangan SKK Migas tahun anggaran 2015 yang memperoleh opini tidak wajar, padahal sebelumnya memperoleh WTP dari tahun anggaran 2011-2014. Kedua, temuan kasus RS Sumber Waras dalam LKPD DKI 2014, yang dilanjutkan dengan audit investigasi. Ketiga, audit tahap II Proyek Hambalang, 'hilangnya 15 nama anggota DPR', dan keempat audit divestasi PT NNT. Atas dasar temuan sersebut, ICW memberi rekomendasi seperti dilakukannya mekanisme banding terhadap hasil audit BPK. Mekanisme tersebut, menurut ICW, dapat membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BPK menjadi bersih dan transparan. (https://news.detik.com/berita/d-3522344/icw-fenomena-suap-opini-wtp mengkhawatirkan)

Tingkat kesehatan perusahaan yang sesungguhnya digambarkan oleh kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Kondisi keuangan perusahaan yang semakin buruk menyebabkan peluang perusahaan semakin besar untuk mendapatkan kualifikasi opini audit kelangsungan usaha, dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan tersebut mendukung penelitian Arga dan Linda (2007) dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh pada pengungkapan kualifikasi perusahaan kelangsungan usaha dengan proksi yang digunakan adalah model prediksi kebangkrutan. Deteksi dini terhadap risiko kebangkrutan perusahaan di masa depan telah diatur dalam standar pengauditan. Statement on Auditing Standards (SAS) No 59 menyebutkan tanggung jawab auditor untuk mengukur kemampuan entitas untuk berlanjut. Respon yang sama diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 30, seksi 341, yang menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam perioda waktu pantas.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007), dalam kasus manipulasi data akuntansi ini sebenarnya tidak hanya pihak dari dalam perusahaan saja yang bertanggung jawab, tetapi pihak dari luar juga sangat berpengaruh. Seperti eksternal auditor juga harus ikut bertanggung jawab terhadap banyaknya kasus-kasus manipulasi data akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik yang dianggap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan juga mulai banyak dipertanyakan, apalagi setelah terbukti bahwa semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Sedangkan profesi akuntan sendiri mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, serta bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Adanya hubungan positif antara kualitas audit dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yang pertama adalah alasan reputasi dan yang kedua adalah alasan kekayaan (deep pocket) yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian ini membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP kecil, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar pula bila mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat (Lennox 1999 dalam Astria 2011). Dengan adanya alasan-alasan tersebut maka KAP besar (big 4) lebih dipercaya oleh masyarakat atau pengguna laporan keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. KAP 4 besar yang disebutkan adalah price water house (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International, dan Ernst and Young (EY). Kantor auditor yang besar menunjukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

kredibilitas auditor yang semakin baik, yang berarti kualitas audit semakin baik pula. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al. (2009:11) yang meneliti tentang faktor-faktor penentu kualitas audit juga menyatakan KAP yang besar akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi jika dibandingkan dengan KAP yang kecil. Hal ini berdasarkan argumen bahwa KAP yang besar memiliki kelebihan dalam empat hal, yaitu: (1) besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani, (2) banyaknya ragam dan jasa yang ditawarkan, (3) luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional, dan (4) banyaknya jumlah staf audit dalam KAP.

Akuntan publik merupakan jasa professional, sehingga dalam penggunaan jasa auditor eksternal klien atau perusahaan wajib mengeluarkan biaya atas jasanya tersebut yang biasa disebut dengan fee audit. (Ishak dalam Suharli, dkk., 2008) mendefinisikan fee audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan audit atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Pada tanggal 2 Juli 2008, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan penentuan Fee audit. Kebijakan tersebut menjelaskan mengenai besarnya fee audit yang wajar dengan mempertimbangkan jasa audit yang diberikan oleh anggota IAPI.

Biaya pokok pemeriksaan akan diperoleh dari tawar menawar yang dilakukan antara klien dengan kantor akuntan publik (Ishak, 2009). Proses tawar-menawar tersebut menjelaskan bahwa terjadi perbedaan besarnya *fee* audit di setiap perusahaan yang akan diauditnya maupun antar kantor akuntan publik itu sendiri, sehingga akan berpengaruh pada penetapan *fee* audit yang terlalu tinggi



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maupun rendah. Jadi *fee* audit dapat mempengaruhi kualitas audit yang diaudit oleh akuntan publik yang dilihat dari berapa besarnya jumlah *fee* audit yang diberikan perusahaan kepada akuntan publik tersebut, sehingga berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya mengetahui faktor penentu kualifikasi audit di Indonesia yang memiliki budaya organisasi, sosial politik, dan regulasi yang berbeda serta dilandasi masih jarangnya penelitian mengenai kualifikasi laporan audit di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, UKURAN **KANTOR AKUNTAN PUBLIK** (KAP), DAN **BIAYA** AUDIT **TERHADAP** KUALIFIKASI OPINI AUDIT (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2016"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti dirumuskan yaitu :

- 1. Apakah *Likuiditas* berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016?
- 2. Apakah *Solvabilitas* berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016?
- 3. Apakah ukuran kantor akuntan public (KAP) berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016?

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik Ul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

- 4. Apakah Biaya audit berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016?
- 5. Apakah *likuiditas*, *solvabilitas*, ukuran kantor akuntan public (KAP) dan biaya audit berpengaruh secara simultan terhadap Kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016
- 2. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah solvabilitas berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016
- Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016
- 4. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah biaya audit berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016
- 5. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah likuiditas, solvabilitas,ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan biaya audit berpengaruh simultan terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan biaya audit berpengaruh terhadap Kualifikasi Opini Audit. Dari uraian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

ty of Soulter Spirif Kasim Riau



© Hak cipta2milk UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Bagi Peneliti untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai kualifikasi opini audit

Bagi Auditor Independen, penelitian ini diharapkan menjadi alat bantu bagi auditor independen untuk mengambil keputusan ketika mengevaluasi calon klien dalam menentukan ruang lingkup audit dan untuk mengontrol kualifikasi opini audit.

- Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan untuk membeli dan menjual saham.
- 4. Bagi akademisi, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian sejenis

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini pemenelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III:

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis data.

BAB IV:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang ada.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di Bab I

ta milik UBN Suska

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ISTAILLE OHIVEISHY OF BUILDING SYAFIL NA

UIN SUSKA RIAU